

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Instutisional

Teori instutisional adalah suatu pemikiran ketika organisasi ingin bertahan hidup, maka organisasi tersebut harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi merupakan entitas yang sah dan layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012). Organisasi yang seluruh kegiatannya mengutamakan pembenaran dari masyarakat, maka akan berusaha menyesuaikan diri pada suatu pengharapan baik eksternal ataupun sosial dimana organisasi tersebut berada. Selain organisasi berusaha untuk dapat menyesuaikan diri, mereka juga cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (*isomorphism*) antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Tekanan eksternal yang dimaksud disini adalah faktor dari luar organisasi yang mampu berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur maupun kegiatannya (Putra, 2016). Akibat kurang baik yang terjadi ketika organisasi menyesuaikan pada harapan eksternal dan sosial salah sataunya yaitu organisasi akan mengesampingkan kegiatan internalnya dan hanya berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis kepada pihak luar (Ridha dan Basuki, 2012).

2.1.2 Isomorfisme Institusional

Menurut Ridha dan Basuki (2012) menyatakan bahwa isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk

menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Teori institusional organisasi dapat memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (*coersive*) dan mematik (*mimetic*).

Rohmandiyah (2018) menyatakan bahwa bahwa Isomorfisme Institusional adalah bentuk dari tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan. *Isomorfisme* mimetik merupakan terjadinya ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi, dimana ketika terjadi isomorfisme mimetik atasan akan mengarahkan bawahanya untuk meniru organisasi yang telah berhasil.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan keuangan.

Bastian (2010) laporan keuangan merupakan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas sektor publik. Menurut Syarmenda (2016) menjelaskan laporan

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan disusun guna menyediakan yang relevan mengenai seluruh transaksi dan posisi keuangan yang

dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Masing-masing organisasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hal tersebut akan mendorong organisasi untuk selalu melaporkan laporan keuangannya secara benar dan transparan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

PASP No.01 Lampiran 1.02 (2010) menjelaskan tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Rohmandiyah (2018) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait perubahan unsur-unsur keuangan yang digunakan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi kepada para pihak-pihak yang terkait.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan berbagai informasi terkait perubahan unsur-unsur keuangan yang digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, dan bentuk dari pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pihak-pihak yang terkait.

2.1.3.3 Jenis Laporan Keuangan

PSAP No.01 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual (2010) menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintahan daerah/pusat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintahan pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal. Penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan

sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkap-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.4 Pelaporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Pelaporan Keuangan

Syarmenda (2016) berpendapat bahwa pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan. Informasi-informasi lain yang dimaksud dalam hal ini seperti informasi sumber daya organisasi yang merupakan bagian integral dengan tujuan memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Menurut Adha

(2014) pelaporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun guna menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan adalah informasi terkait kondisi keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingn untuk melihat posisi keuangan suatu organisasi (Rohmandiyah, 2018).

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan merupakan pelaporan keuangan yang berisi tentang informasi terkait sumber daya informasi atau kondisi keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melihat posisi keuangan guna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2.1.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Asroel (2016) tujuan dari pelaporan keuangan untuk memenuhi pengungkapan laporan keuangan ditambah dengan informasi operasional organisasi secara keseluruhan dengan data-data yang dianggap cukup.

PSAP No. 01 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual (2010) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
4. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
6. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan berbagai informasi mengenai

kondisi keuangan suatu organisasi yang mungkin dibutuhkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.4.3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

Informasi laporan keuangan sama halnya dengan kualitas pelaporan keuangan. Dimana laporan keuangan semakin informative maka dapat meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangannya.

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 menjelaskan terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang digunakan laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, ketika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

b. Andal

Informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material,

menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya karakteristik yang dicantumkan dalam peraturan sebagai prasyarat normatif diharapkan dapat membantu suatu organisasi dalam memberikan informasi guna meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangannya.

2.1.5 Transparansi pelaporan keuangan

2.1.5.1 Pengertian Transparansi Pelaporan Keuangan

Mardiasmo (2004) transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Sari (2017) transparansi pelaporan keuangan, dalam memberikan informasi terkait laporan keuangan, kinerja suatu organisasi, informasi tentang sumber daya organisasi, informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dalam suatu organisasi dapat diberikan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran.

Transparansi pelaporan keuangan adalah upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dirilis secara legal baik positif ataupun negatif, tepat waktu, akurat, tegas dan seimbang dengan tujuan meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggungjawab SKPD atas kebijakan, tindakan, dan praktik yang dilakukan (Andriyani, 2016).

Adanya penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan suatu organisasi dalam menyampaikan atau memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik secara terbuka, lengkap, dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Transparansi pelaporan keuangan dapat diukur menggunakan indikator yang sama dari Ridha dan Basuki (2012) yaitu:

1. Kelengkapan informasi, terdiri dari:

a. Keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian SKPD

Keberhasilan SKPD terkait kinerja pegawai yang didalamnya khususnya laporan keuangan, dalam hal ini SKPD juga harus menyampaikan keberhasilan pencapaian SKPD kepada masyarakat. Banyaknya faktor penyebab terjadinya ketidakberhasilan pencapaian skpd menjadikan hal yang wajar karena tidak semua SKPD berjalan dengan berhasil. Maka ketika SKPD mengalami ketidak berhasilan dalam pencapaian juga harus dilaporkan kepada masyarakat. Adanya hal ini masyarakat akan menilai bahwa SKPD sudah memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang ada tanpa menutupi suatu hal apapun.

b. Akurat dan tepat waktu

Laporan keuangan harus akurat selain itu informasi yang dilaporkan juga harus tepat waktu, dengan adanya informasi yang sesuai dengan syarat dan peraturan yang ditentukan maka memberikan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Akses stakeholder

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu entitas dan sebagai akses pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam penyusunannya agar mendapatkan hasil yang mudah dipahami bagi pemangku kepentingan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Transparansi

Menurut Adha (2014) menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis transparansi yaitu :

1. Kemudahan akses informasi

Suatu organisasi wajib untuk menyediakan akses informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi, sehingga pembaca akan sangat terbantu dengan adanya akses yang mudah dan informasi yang jelas.

2. Penyediaan informasi yang jelas

Informasi yang jelas dan dapat dimengerti akan memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan, dimana dengan adanya penyediaan informasi yang benar dan jelas akan meningkatkan integritas suatu organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada organisasi tersebut.

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan

Penyusunan mekanisme pengaduan perlu dilakukan oleh suatu organisasi, dimana pembaca juga mempunyai hak atau kebebasan dalam memberikan pendapat atau masukan. Sehingga dengan adanya pengaduan dari para pembaca informasi diharapkan dapat memperbaiki informasi menjadi lebih baik.

4. Meningkatkan arus informasi

Tidak mudah dalam melakukan penerapan transparansi, terdapat hambatan dan rintangan karena adanya beberapa faktor. Untuk menjaga kestabilan transparansi dibutuhkan peningkatan dalam arus informasi, informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang terus menerus memberikan keupdetan data yang sekiranya dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki berbagai jenis diantaranya yaitu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, dengan adanya transparansi tersebut dapat mempermudah bagi pengguna informasi dalam memahami isi dari informasi yang diberikan.



2.1.5.3 Tujuan Transparansi

Menurut Sari (2017) menjelaskan tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholder dan lembaga yaitu:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Membangun kepercayaan seluruh pihak dari aktivitas yang dilakukannya.
4. Mendorong masyarakat untuk selalu bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Tercapainya pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Yesnita (2016) memaparkan bahwa tujuan transparansi yaitu untuk dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi adalah untuk mencegah dan menghindari penyimpangan atau kesalahan didalam organisasi, guna terciptanya pelaksanaan kegiatan organisasi secara maksimal

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

2.1.6 Tekaanan Eksternal

2.1.6.1 Pengertian Tekanan Eksternal

Menurut Noprizal (2017) tekanan eksternal dapat diartikan sebagai dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakan yang berasal dari luar SKPD, seperti dorongan atau larangan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Syarmenda (2016) tekanan eksternal adalah tekanan yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi lebih rendah, terutama terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.

Suatu hal yang terkait dengan lingkungan disekitar organisasi juga memiliki keterkaitan dengan *isomorfisme koersif*. *Isomorfisme koersif* merupakan hasil tekanan dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi. Perubahan pada organisasi yang didasari oleh kekutan koersif dapat menimbulkan organisasi lebih memikirkan pengaruh politik daripada teknisnya.

Kesimpulan dari beberapa penjabaran diatas yaitu suatu tekanan atau dorongan yang berasal dari luar organisasi yang

dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan dalam suatu organisasi.

Tekanan eksternal dapat diukur menggunakan beberapa indikator (Ridha dan Basuki, 2012):

a. Peraturan dan undang-undang yang mengatur transparansi

Undang-undang yang mengatur terkait transparansi pelaporan keuangan dapat memudahkan suatu organisasi untuk membudayakan transparansi. Adanya hal ini organisasi berupaya untuk memberikan laporan dan informasi secara transparan, jelas, dan dapat dipahami.

b. Adanya pemberitaan dari media masa

Media massa merupakan alat komunikasi masyarakat yang sangat digandrungi oleh banyak orang, media massa juga berperan penting dalam hal penerapan transparansi pelaporan keuangan. Media massa menuntut organisasi untuk menyampaikan informasi laporan keuangan secara transparan, akurat, dan tepat waktu serta dilaporkan secara terbuka agar mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan

c. Adanya tuntutan dari pemerintah

Dengan adanya tuntutan dari pemerintah, organisasi akan berupaya untuk menerapkan transparansi yang tercantum dalam undang-undang. Tuntutan tersebut akan

berdampak positif dalam proses penerapan transparansi pelaporan keuangan.

d. Perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Lembaga kemasyarakatan akan menyampaikan aspirasinya guna untuk menciptakan transparansi yang diinginkan masyarakat.

e. Adanya tuntutan dari pengusaha dan komunitas bisnis

Begitupun dengan adanya tuntutan dari pengusaha dan komunitas bisnis akan memberikan aspirasinya gunas transparansi tercapai.

2.1.6.2 Jenis-jenis Tekanan Eksternal

Menurut Andriyani (2016) macam-macam tekanan eksternal yaitu:

1. Adanya pengaruh politik

Politik juga memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, dimana politik salah satu bentuk dari tekanan eksternal. Perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

2. Kebutuhan untuk legitimasi

Banyaknya faktor-faktor tekanan eksternal yang menjadi tuntutan dan tekanan bagi suatu organisasi, terkadang dapat menyebabkan organisasi memberikan informasi hanya untuk memenuhi kebutuhan legitimasi pada organisasi, bukan benar-benar memberikan informasi yang sesuai dan transparan.

Sedangkan menurut Yesnita (2016) menjelaskan macam-macam tekanan eksternal yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan (Regulasi)

Adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah pusat, guna mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Namun disisi lain, dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh legitimasi saja, sehingga hanya menekankan aspek-aspek yang positif saja agar suatu organisasi terlihat baik oleh pihak luar.

2. Adanya pengaruh politik

Pengaruh politik merupakan salah satu bentuk tekanan eksternal, dimana perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh politik akan mengakibatkan perubahan dalam pola disuatu organisasi yang ditandai dengan pelaporan keuangan yang transparan hanya dijadikan formalitas demi memperoleh legitimasi.

Dari beberapa uraian diatas bahwa tekanan eksternal memiliki berbagai macam bentuk seperti adanya pengaruh politik, kebutuhan untuk legitimasi, dan adanya peraturan undang-undang. Dengan adanya tekanan tersebut bisa mempercepat ataupun memperlambat proses transparansi, sehingga masing-masing organisasi dituntut untuk mampu menanggapi atau mengatasi tekanan tersebut.

2.1.7 Ketidakpastian Lingkungan

2.1.7.1 Pengertian Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berdampak mengganggu kinerja organisasi apabila organisasi tidak mampu untuk beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan ataupun dinamikanya (Asroel, 2016). Menurut Syarmenda (2016) ketidakpastian lingkungan adalah situasi atau keadaan dimana seseorang terkendala untuk memprediksi keadaan disekitar, sehingga seseorang menghadapi ketidakpastian tersebut. Faktor seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak sesuainya antara peraturan yang satu dengan yang lain, dan terjadinya mutasi staf yang cepat, hal tersebut merupakan penyebab terjadinya ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan menyebabkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Ridha dan Basuki, 2012).

Rendahnya pemahaman organisasi dalam menyesuaikan peraturan yang baru merupakan akibat dari ketidakpastian organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan. Didalam suatu keadaan yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang mungkin dapat dilakukan organisasi yaitu meniru organisasi lain yang mereka anggap lebih baik dari organisasinya.

Dari penjabaran ketidakpastian lingkungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpastian lingkungan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dialami oleh sebuah organisasi yang sulit dalam memprediksi situasi disekitarnya yang diakibatkan oleh suatu perubahan pada lingkungan yang ada, hal ini dapat mempengaruhi suatu organisasi sehingga dengan adanya hal tersebut organisasi diharapkan mampu untuk mengendalikan keadaan lingkungannya agar tetap terkedali.

Ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan indikator yang sesuai dari Ridha dan Basuki (2012):

a. Dukungan dari masyarakat

Dukungan dari masyarakat dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan sangat besar, karena akan meningkatkan legitimasi pada suatu organisasi

b. Lingkungan yang stabil

Organisasi diharapkan mampu menjaga kestabilan ketidakpastian lingkungan guna memenuhi tuntutan publik serta penerapan transparansi pelaporan keuangan berjalan dengan maksimal.

c. Informasi keuangan yang berdampak positif dan negative

Informasi keuangan yang berdampak positif dan negatif sangat dibutuhkan pihak-pihak terkait, sehingga organisasi diharapkan menyediakan informasi secara akurat dan sesuai dengan kebenarannya.

d. Konsep transparansi yang sama

Adanya tuntutan tersebut organisasi akan mencontoh konsep transparansi pada organisasi lain yang dianggap sudah menjalankan transparansi dengan baik dan benar.

2.1.7.2 Jenis-jenis Ketidakpastian Lingkungan

Andriyani (2016) menjelaskan jenis ketidakpastian lingkungan yaitu:

1. Perubahan peraturan yang cepat

Peraturan yang seketika berubah maka akan berdampak pada lingkungan di suatu organisasi, dimana perubahan peraturan yang cepat dapat menyebabkan adanya ketidakpastian lingkungan. Akibatnya organisasi akan berubah pola dan sistem dalam lingkungan tersebut dapat menyesuaikan dengan

peraturan yang baru dan mulai beradaptasi kembali dengan peraturan yang ada.

2. Adanya peraturan yang berbeda

Adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain dapat mengakibatkan organisasi berupaya untuk menyesuaikan kembali dengan peraturan yang sesuai dan memang dibutuhkan organisasi tersebut.

Menurut Rohmandiyah (2018) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga (3) tipe yaitu:

1. Stated uncertainty

Suatu hal yang dihubungkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dipersepsi atau bias dikatakan sebagai suatu anggapan.

2. Responds uncertainty

Ketidakmampuan dalam memprediksi konsekuensi dari pilihan-pilihan keputusan untuk merespon kondisi dalam lingkungan.

3. Effect uncertainty

Ketidakmampuan dalam memprediksi pengaruh lingkungan dimasa yang akan datang terhadap suatu organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis dan tipe dari ketidakpastian lingkungan merupakan suatu kondisi

ketidakmampuan individu dalam organisasi untuk memprediksi sekitarnya dengan permasalahan yang semakin kompleks.

2.1.8 Akuntabilitas

2.1.8.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan memberikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah, dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka

menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah (Sri, 2019).

Menurut Adha (2014) akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas kegiatan dan kinerja kepada pihak-pihak yang terkait. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu menjadi subjek penyedia informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk didengar aspirasinya, dan hak untuk diberi informasi.

Kesimpulan dari akuntabilitas adalah suatu kewajiban pemberi informasi yang harus dilakukan oleh organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik kepada pihak-pihak terkait dan yang membutuhkan informasi tersebut.

Akuntabilitas dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan beberapa indikator, (Sari, 2017):

a. Integritas keuangan

Integritas keuangan merupakan kejujuran penyajian laporan keuangan, agar laporan dapat diandalkan.

Informasi yang terdapat didalamnya harus menggambarkan secara jujur terkait transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.

b. Pengungkapan

Pengungkapan mewajibkan laporan keuangan disajikan dan didesain sebagai kumpulan kenyataan dari fenomena ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah harus dapat menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah.

2.1.8.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Madiasmo (2009) menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi dalam akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi, dan sistem

informasi manajemen. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntansi program

Akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.

Asroel (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah.

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan pemaparan jenis-jenis akuntabilitas maka dapat disimpulkan akuntabilitas terbagi menjadi beberapa instrumen, dan pada dasarnya akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban pihak-pihak yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.9 Sistem Pengendalian Internal

2.1.9.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 40 tahun 2010 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan kementerian dalam negeri adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal yaitu sebagai suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang untuk membantu

organisasi mencapai tujuan tertentu (Sari, 2017). Menurut Wiranti dan Suardana (2018) suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan laporan keuangan dimana pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, untuk menjaga keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan menjaga kekayaan organisasi.

Sistem pengendalian internal dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan beberapa indikator (Yesnita, 2016):

1. Lingkungan Pengendalian

Pemimpin instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari dalam, terdiri atas kegiatan identifikasi resiko, dan analisis resiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisiensi dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga dapat memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.9.2 Jenis-jenis Sitem Pengendalian Internal

1. Pengendalian Internal Akuntansi

Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.

2. Pengendalian Internal Administratif

Pengendalian internal administratif dibuat untuk dapat mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan uraian diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal akuntansi dan pengendalian interndal administratif merupakan langkah pengendalian yang dapat menunjang sistem pengendalian kinerja yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rahmad Bintang Shabri Asroel (2016).	Akuntabilitas (X1), Ketidakpastian Lingkungan (X2), Komitmen Manajemen (X3), Pengendalian Internal (X4),	Akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi

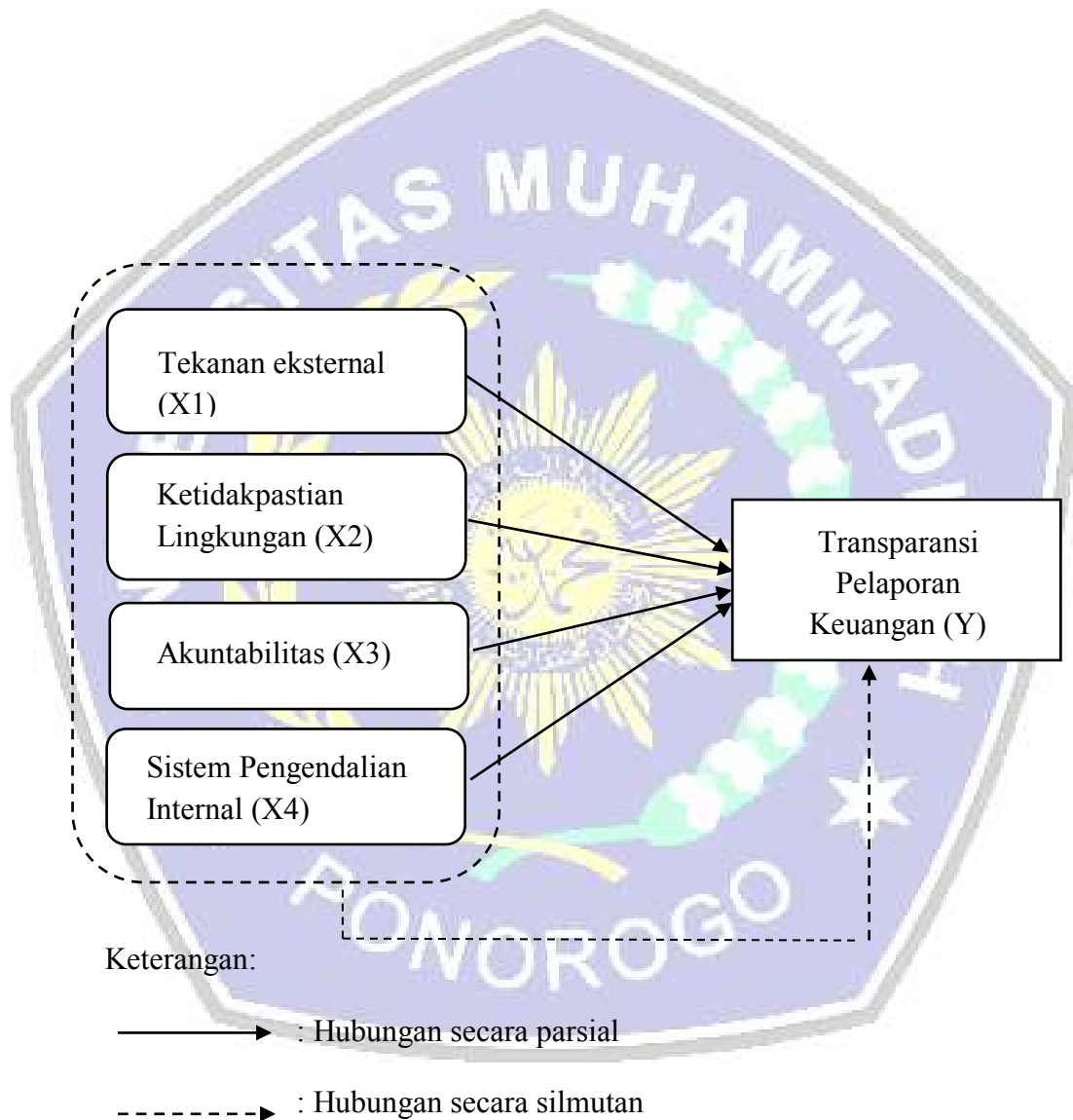
		Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	pelaporan keuangan.
2	Yulinda Devi Pramita, Siti Noor Khikmah (2016)	Tekanan Eksternal (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Komitmen Manajemen (X4), Penerapan Tranparansi Pelaporan Keuangan (Y).	Tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, komitemn majamen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3	Rian Noprizal (2017).	Tekanan Eksternal (X1), Ketidakpastain Lingkungan (X2), Komitmen Manajemen (X3), Sistem Pengendalian Pemerintah (X4), Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.	Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4	Embun Widya Sari (2017).	Sistem Pengendalian Intern (X1), Penyajian Laporan Keuangan (X2), Aksesilibilitas Laporan Keuangan (X3), Gaya Kepemimpinana (X4), Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaaam Keuangan Daerah	Sistem pengendalian intern, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan. Penyajian laporan keuangan, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan.
5	Komang Ayu Tri Wintari, Ketut Alit Suardana (2018).	Tekanan Eksternal (X1), Pengendalian Internal (X2), Ketidakpastian Lingkungan (X3), Komitemn Manajemen (X4), Transparansi Pelaporan Keuangan (Y).	Tekanan eksteranal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitemn organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Sumber: Ringkasan penelitian terdahulu yang diolah tahun 2020

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang menjelaskan tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan

keuangan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan pustaka serta hasil dari penelitian terdahulu, banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

penerapan transparansi pelaporan keuangan, sehingga dalam penelitian ini diambil variabel independen tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal yang nantinya akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Pada dasarnya transparansi pelaporan keuangan merupakan tuntutan dari masyarakat terlebih dari pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan yang transparan. Faktor tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal dianggap mampu mempengaruhi dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Tekanan yang berasal dari pihak luar seperti peraturan, tekanan dari masyarakat dan sebagainya merupakan tekanan eksternal yang menjadi salah satu faktor kurangnya akan kesadaran pelaporan keuangan secara transparan. Akibat dari tekanan eksternal organisasi dapat mengalami ketidakpastian lingkungan seperti sering terjadinya perubahan peraturan, terjadinya mutasi staf yang cepat, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Upaya penerapan transparansi pelaporan keuangan juga dibutuhkan akuntabilitas yang baik dimana organisasi dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dilakukan. Faktor terakhir yaitu sistem pengendalian internal dimana semakin tinggi sistem pengendalian internal yang diterapkan pada suatu organisasi, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan.

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris

(Sugiyono, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Semakin tinggi tekanan eksternal akan memicu dalam meningkatnya penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tekanan tersebut berasal dari luar organisasi, seperti terbitnya peraturan perundang-undangan terkait transparansi (Ridha & Basuki, 2012).

Penelitian Wintari&Suardana (2018), dan Yesnita (2018) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, yaitu berupa adanya peraturan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:

H_{01} = Tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H_{a1} = Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Semakin meningkatnya ketidakpastian lingkungan dapat memicu meningkatnya penerapan transparansi pelaporan keuangan. Asroel (2016) berpendapat bahwa semakin meningkatnya ketidakpastian lingkungan di suatu organisasi akan mendorong suatu organisasi tersebut untuk mampu menyesuaikan dengan lingkungan barunya, sehingga ketika organisasi sudah siap dengan segala keadaan maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian Wintari dan Suardana (2018) dan Asroel (2016) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H_{02} = Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H_{a2} = Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya, sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan informasi terkait laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan atau melakukan transparansi. Adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini memberikan kepercayaan yang lebih dari publik sehingga harapan masyarakat akan adanya keterbukaan dari pemerintah dapat terwujud (Asroel, 2016).

Penelitian Asroel (2016) dan Rohmandiyah (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut :

H_{03} = Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H_{a3} = Akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan dipemerintahan, maka dalam pengungkapan proses transparansi pelaporan keuangan akan menjadi lebih transparan, sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal organisasi dapat mengarahkan, mengawasi serta dapat mengukur sumber daya yang ada di dalam organisasi (wintari & suardana, 2018).

Penelitian Yesnita (2016) dan Noprizal (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 4 sebagai berikut :

H_{04} = Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H_{a4} = Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2.4.5 Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Adanya tekanan eksternal, terjadinya ketidakpastian lingkungan, terbentuknya akuntabilitas dan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka dianggap akan mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Jika tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal tinggi maka dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan tersebut juga akan terealisasi dengan cukup baik. Berdasarkan teori dan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 5 sebagai berikut :

H_{05} = Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H_{a5} = Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.